



**KEPERCAYAAN MAHASISWA UNNES TERHADAP  
PARTAI POLITIK SETELAH PEMILIHAN UMUM**

**2019**

**SKRIPSI**

Disajikan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Oleh

Mardina Dwi Handayani

1511412147

**JURUSAN PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul “Kepercayaan Mahasiswa Unnes Terhadap Partai Politik Setelah Pemilihan Umum” ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,



Mardina Dwi Handayani

1511412147

## PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "Kepercayaan Mahasiswa Unnes Terhadap Partai Politik Setelah Pemilihan Umum 2019" ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 Psikologi pada hari Rabu, 21 Agustus 2019

Panitia Ujian Skripsi:



Dr. Saraswati, M.Pd.,Kons  
NIP. 196006031999032001

Sekretaris

Sugiaryanti, S. Psi., M.A

NIP. 197804192003122001

Penguji I

Sugiyarta Stanislaus, S. Psi., M.Si

NIP. 19600816198503100

Penguji II

Abdul Azis, S.Psi., M.Psi

NIP. 19820423 201404 1 001

Penguji III/ Dosen Pembimbing

Luthfi Fathah Dahriyanto, S.Psi., M.A.

NIP. 197912032005011002

## **MOTTO DAN PERUNTUKAN**

### **Motto :**

*“If I have to belief that i can do it, I shall surelry acquire the capacity to do it, even if I may not have it at th begining” –Mahatma Gandhi-*

### **Persembahan :**

Skripsi ini penulis peruntukan kepada mama, papa, kakak serta adik-adik yang senantiasa memberi do'a dan dukungan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puja dan puji bagi Mu ya Allah atas karuniaMu sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan dengan judul “Kepercayaan Mahasiswa Unnes Terhadap Partai Politik Setelah Pemilihan Umum 2019” .

Bantuan, motivasi, dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada:

1. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Sugeng Haryadi, S.Psi., M.Psi sebagai Ketua Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Luthfi Fathan D., S.Psi., M.A sebagai Dosen Pembimbing sekaligus dosen wali penulis telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dosen penguji I Sugiyarta Stanislaus, S. Psi., M.Si dan dosen penguji II Abdul Aziz, S.Psi., M.Psi yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap skripsi penulis.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Psikologi FIP UNNES yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

6. Orang tuaku Bapak Sukijan, A.Md.Kes dan Ibu Limaftukhah yang senantiasa sabar serta memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Yang tersayang kakak ku Anggit Purwati, S.KG, adik-adik ku Muhammad Faizi Akbar, Muhammad Faizi Agung, dan Muhammad Faizi Amin, terimakasih untuk do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Sahabat tercinta S. Farah F, Yusri Maulina, Frederike, Ela R, Khusnul K, Isna L, Ahmad AS, Anggarda GP, Rikzi I, Alfin N, Faniarida, Resti, Nuzulia K, Anis ND, Intan, Sari, Ely yang selalu memberikan semangat pada penulis.
9. Teman-teman tersayang Rizkia U, Talitha, Noviana Iman, Kurnilia Ika, Lutfi NP, Wulan, Ery, Vita, Abu, Tri Aji, Anton, Prisca, Enjang, Tisa. Terimakasih telah memberikan motivasi dan membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman BEM FIP 2013, BEM FIP 2014, BEM FIP 2015, dan BEM KM 2016 yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman selama di UNNES.
11. Teman-teman seperjuangan Psikologi angkatan 2012 yang telah mewarnai kisah selama di UNNES.
12. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. *Jazakumullaahu khairan katiiran.*

Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi untuk perkembangan ilmu, khususnya psikologi.

Semarang,



Mardina Dwi Handayani

1511412147

## ABSTRAK

Handayani, Mardina Dwi. 2019. Kepercayaan Mahasiswa Unnes Terhadap Partai Politik Setelah Pemilihan Umum 2019. *Skripsi*. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Luthfi Fathan D., S.Psi., M.A.

**Kata Kunci** : Kepercayaan Politik

Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga partai politik merupakan instrumen penting dalam pemerintahan. Setiap 5 tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan umum yang biasa disingkat Pemilu untuk mengganti tatanan pemerintahan seperti anggota legislatif, Presiden dan wakil Presiden. Setiap pemilu yang dilaksanakan terdapat harapan besar masyarakat mengenai perubahan kebijakan yang akan memihak dan mensejahterkan rakyat. Harapan ini muncul dikarenakan citra pemerintahan yang semakin buruk, dengan adanya berbagai kasus, terutama kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mahasiswa memiliki peran yang penting di kancah perpolitikan Indonesia. Melalui lembaga kemahasiswaan mahasiswa tidak hanya berperan dalam bidang akademik saja namun mahasiswa juga memiliki kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintah. Peran politik mahasiswa ditunjukkan dengan adanya pembicaraan, perdebatan, dan diskusi mengenai isu-isu politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan sampel sebanyak 209 mahasiswa. Sampel diambil menggunakan teknik *cluster random sampling*. Data yang diambil menggunakan skala kepercayaan politik sebanyak 40 aitem dengan menghasilkan aitem yang valid sebanyak 29 aitem, validitasnya berkisar dari 0,02 sampai dengan 0,583 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil dari skala Kepercayaan politik pada penelitian ini diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,860.

Kepercayaan terhadap partai politik oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang berada dalam kategori sedang cenderung rendah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif dengan hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh *mean* empiris sebesar 70,33 yang jika dilihat berdasarkan kategorisasi berada ada interval skor  $65,25 < X \leq 79,75$  yang berarti *mean* empiris masuk dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Mahasiswa Universitas Negeri Semarang memiliki tingkat kepercayaan politik pada kategori sedang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERUNTUKAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	
xviii	
<b>BAB</b>	
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan .....	12
1.4 Manfaat .....	12
<b>BAB</b>	
2. LANDASAN TEORI .....	13
2.1 Kepercayaan pada partai politik .....	13
2.1.1 Pengertian Kepercayaan .....	13
2.1.2 Aspek-aspek Kepercayaan .....	16
2.1.3 Komponen – komponen Kepercayaan .....	16
2.1.4 Faktor-faktor Kepercayaan.....	17
2.1.5 Pengertian Partai Politik .....	19
2.1.6 Tujuan Pengertian Partai Politik .....	20
2.1.7 Fungsi Pengertian Partai Politik .....	21
2.1.8 Kepercayaan Partai Politik .....	22
2.1.9 Mahasiswa .....	24

2.1.9.1 Pengertian Mahasiswa .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu mengenai Kepercayaan pada Parpol .....	25
2.3 Kerangkai Berpikir .....	26
<b>BAB</b>	
3. METODE PENELITIAN .....	30
3.1 Jenis dan Desain Penelitian .....	31
3.2 Variabel Penelitian.....	32
3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian.....	32
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.3.1 Populasi .....	33
3.3.2 Sampel .....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5 Instrumen Penelitian disertai Uji Validitas dan Reliabilitas.....	36
3.5.1 Validitas .....	37
3.5.2 Reliabilitas .....	38
3.6 Metode Analisis Data .....	38
<b>BAB</b>	
4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1 Persiapan Penelitian.....	40
4.1.1 Orientasi Kancan Penelitian .....	40
4.1.2 Penentuan Subjek Penelitian.....	41
4.1.3 Penyusunan Alat Ukur .....	41
4.2 Uji Coba Instrumen .....	43
4.2.1 Melakukan Uji Coba Instrumen.....	43
4.2.2.1 Hasil Uji Validitas .....	43
4.3 Pelaksanaan Penelitian .....	44
4.3.1 Proses Pengumpulan Data Penelitian .....	44
4.3.2 Proses Skoring .....	45
4.4 Hasil Penelitian.....	46
4.4.1 Analisis Data Deskriptif .....	46

4.4.2	Gambaran Umum Kepercayaan Politik .....	47
4.4.3	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik .....	51
4.4.3.1	Gambaran Spesifik Kepercayaan Berdasarkan Aspek <i>Trust With Politicians</i> .....	51
4.4.3.2	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Aspek <i>Trust With Institutions</i> .....	53
4.4.3.3	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Aspek <i>Trust With Democracy</i> .....	56
4.4.4	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia .....	61
4.4.4.1	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Remaja Lanjut.....	63
4.4.4.2	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Dewasa Awal .....	63
4.4.5	Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	70
4.4.5.1	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ilmu Pendidikan .....	72
4.4.5.2	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Bahasa dan Sastra .....	74
4.4.5.3	Gambaran Spesifik Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ekonomi .....	76
4.5	Hasil Pengujian Normalitas dan Homogenitas .....	81
4.5.1	Hasil Uji Normalitas .....	81
4.5.2	Hasil Uji Homogenitas .....	82
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian .....	82
4.6.1	Analisis Deskriptif .....	83
4.7	Keterbatasan .....	89
BAB		
5.	PENUTUP .....	91
5.1	Simpulan .....	91
5.2	Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....		95

LAMPIRAN.....	97
---------------	----

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hasil Penyebaran Angket Studi Pendahuluan .....	9
Tabel 3.1 Kriteria Skor Jawaban Item Kepercayaan Politik .....	36
Tabel 3.2 <i>Blueprint</i> Skala Kepercayaan Politik .....	36
Tabel 4.1 <i>Blueprint</i> Skala Kepercayaan Politik .....	34
Tabel 4.2 Penggolongan Kriteria Analisis berdasarkan <i>Mean</i> Teoritis .....	46
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Umum Kepercayaan Politik ....	48
Tabel 4.4 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik .....	49
Tabel 4.5 Penggolongan Kriteria Gambaran Aspek <i>Trust with politicians</i> ....	51
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Aspek <i>Trust with politicians</i> ...	52
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Aspek <i>Trust with intitution</i> .....	54
Tabel 4.8 Penggolongan Kriteria Gambaran Aspek <i>Trust with intitution</i> .....	54
Tabel 4.9 Penggolongan Kriteria Gambaran Aspek <i>Trust with democracy</i> ....	57
Tabel 4.10 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Aspek <i>Trust with democracy</i> .	57
Tabel 4.11 Ringkasan Deskriptif berdasarkan Aspek .....	59
Tabel 4.12 Perbandingan <i>Mean</i> Empiris tiap Aspek Kepercayaan Politik .....	60
Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia .....	62
Tabel 4.14 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Remaja Lanjut .....	64
Tabel 4.15 Hasil Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Remaja Lanjut .....	65
Tabel 4.16 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Dewasa Awal .....	67
Tabel 4.17 Ringkasan Deskriptif Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia .....	68
Tabel 4.18 Perbandingan <i>Mean</i> Empiris Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.19 Hasil Statistik Deskriptif Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	71

Tabel 4.20 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ilmu Pendidikan .....	73
Tabel 4.21 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Bahasa dan Sastra .....	75
Tabel 4.22 Penggolongan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ekonomi .....	77
Tabel 4.23 Ringkasan Kriteria Gambaran Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	79
Tabel 4.24 Perbandingan <i>Mean</i> Empiris Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	80
Tabel 4.25 Hasil Perhitungan Statistik Uji Normalitas .....	81
Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Statistik Uji Homogenitas .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	29
Gambar 4.1 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik .....	50
Gambar 4.2 Diagram Gambar Spesifik Aspek <i>Trust with politicians</i> .....	53
Gambar 4.3 Diagram Gambar Spesifik Aspek <i>Trust with Intitutions</i> .....	56
Gambar 4.4 Diagram Gambar Spesifik Aspek <i>Trust with Democracy</i> .....	59
Gambar 4.5 Diagram Ringkasan Hasil Hitung Deskriptif Kepercayaan Politik Tiap Aspek .....	60
Gambar 4.6 Diagram Ringkasan <i>Mean</i> Empirik Kepercayaan Politik Tiap Aspek .....	61
Gambar 4.7 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia.....	63
Gambar 4.8 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Remaja Lanjut .....	66
Gambar 4.9 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia Dewasa Awal .....	68
Gambar 4.10 Diagram Ringkasan Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Usia .....	69
Gambar 4.11 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	72
Gambar 4.12 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ilmu Pendidikan .....	74
Gambar 4.13 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Bahasa dan Sastra .....	76
Gambar 4.7 Diagram Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas Ekonomi.....	78
Gambar 4.7 Diagram Ringkasan Gambar Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan Fakultas .....	79
Gambar 4.7 Diagram Ringkasan <i>Mean</i> Empirik Umum Kepercayaan Politik Berdasarkan .....	80

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politik menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya di Indonesia. Peran politik sangat penting untuk pemerintahan, karena dengan adanya politik ini pemerintah membuat peraturan dan kebijakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis.

Menurut smith, et al (dalam eko handoyo 2010:144) partai politik adalah organisasi politik yang menganut ideologi tertentu atau mewakili sejumlah kepentingan atau nilai-nilai tertentu dan mencoba menggunakan kekuasaan politik untuk memperoleh jabatan publik.

Eko Handoyo dkk (2010:143) menyimpulkan bahwa politik adalah peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di sebuah negara dalam membuat keputusan, dan mendistribusikan nilai dalam bentuk barang dan jasa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam kehidupan politik, terdapat pula sebuah istilah elit politik. Elit politik seperti halnya dijelaskan oleh Surbakti (dalam Eko Handoyo 2010:144) merupakan sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Namun, Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karenanya, terdapat alat untuk menjalankan sistem pemerintahan agar asas demokrasi terwujud dengan baik. Salah satu alat tersebut adalah partai politik. Partai politik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya pemerintahan yang demokratis bergantung pada keberadaan partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) mengartikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik menurut Amal (dalam Handoyo, 2008:149) memiliki fungsi beraneka macam. Pada umumnya partai politik memiliki enam fungsi: (1) partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, (2) partai politik sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan, (3) fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, (4) fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik, (5) fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, (6) partai politik sebagai sarana pendidik politik. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2008 partai politik berfungsi sebagai (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3)

penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga negara indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam pembahasan mengenai partai politik, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai rakyat. Rakyat adalah warga negara yang memiliki berbagai kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa saja sejalan, berbeda, atau bahkan bertentangan. Partai politik dalam proses merumuskan kebijakan publik harus bisa memerankan fungsinya dalam mengajukan, menggabungkan kepentingan, dan mencari alternatif-alternatif terbaik untuk dapat memenuhi aspirasi-aspirasi rakyat dalam konteks kemasyarakatan agar menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang nantinya dapat menyejahterakan rakyat.

Selain itu, partai politik seharusnya dapat menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada masyarakat sehingga nilai dan etika yang berlaku dapat tertanam pada diri masyarakat. Partai politik juga memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk dapat menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian partai politik seharusnya juga mengkomunikasikan ide, gagasan, informasi, isu dan program-program partai sehingga dapat sejalan dengan masyarakat.

Partai politik yang mampu melaksanakan perannya dengan baik tentunya akan menjadi pilihan masyarakat, sedangkan partai politik yang tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik akan ditinggalkan dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Berbicara lebih lanjut mengenai konsep kepercayaan, pada dasarnya telah menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam ilmu psikologi. Menurut Zulkarnain (2016:141) kepercayaan adalah komponen kognitif yang berasal dari sosiopsikologis. Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan, dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Menurut Solomon (dalam Zulkarnain 2016:141) kepercayaan terbentuk dari adanya pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan.

Sedangkan kepercayaan politik sendiri adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang dalam pemerintahannya. Kepercayaan politik menyangkut pandangan orang mengenai hal-hal yang dihasilkan oleh politisi, sistem, politik, dan institusi-institusi. Gamson (dalam Nurfitri 2018) menjelaskan bahwa didalam kepercayaan politik, terdapat suatu ekspektasi bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kepercayaan politik ini merupakan salah satu masalah dalam perpolitikan yang masih menjadi topik hangat di media massa. Masyarakat mulai tidak percaya terhadap partai politik sebagai elit politik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar politik Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Pratikno yang menjelaskan

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin rendah dibandingkan dengan lembaga pemerintahan lainnya, pada tahun 2007 menjadi 5,8 dari angka 8 pada tahun 2004. Posisi tersebut di bawah tentara 26%, polisi 15%, dan perlemen 13%. Hal ini juga didukung oleh survei yang dilakukan tim Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2018, sebagaimana yang Rully paparkan sebanyak 75% masyarakat khawatir dan kurang percaya pada partai politik. Sedangkan Charta Politika (2018) merilis hasil surveinya, yaitu sebanyak 45,8% responden menilai partai politik menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya.

Rendahnya kepercayaan pada partai politik dipicu oleh banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dan dilakukan oleh partai ataupun para elit politik. Persoalan yang marak di Indonesia adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau yang sering disingkat KKN. Selain itu semakin tidak sejahteranya masyarakat juga menjadi pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Persoalan mengenai korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat pada tahun 2015 ada 505 kasus korupsi dengan kerugian mencapai 3,1 triliun, pada tahun 2016 setidaknya ada 482 kasus dengan 1.101 tersangka dengan kerugian mencapai 1,4 triliun, sedangkan pada tahun 2017 ada 576 kasus dengan 1.298 tersangka dengan total kerugian negara mencapai 6,5 triliun. Sementara pada tahun 2018 ICW mencatat adanya penurunan kasus korupsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 454 kasus dengan 1.087 tersangka dengan total kerugian mencapai 5,7 triliun.

Selain itu banyaknya aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak dapat disalurkan dengan baik dan tidak mendapatkan penanganan yang baik dari elit politik memicu adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik.

Sebagai negara demokrasi tentunya rakyat menuntut adanya kesejahteraan, sedangkan pada kenyataannya kesejahteraan rakyat semakin menurun. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) pada tahun 2015 menjabarkan setidaknya ada empat indikator yang menyebabkan turunnya angka kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indikator pertama ialah perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2014 sebesar 5,7% di semester I menjadi 4,7% di semester I tahun 2015. Indikator kedua ialah tingginya tingkat inflasi terutama pada kelompok makanan, dalam hal ini naiknya harga-harga bahan makanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi untuk kelompok makanan bulan Juni 2015 sebesar 8,5%. Indikator yang ketiga ialah karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut dengan beras miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sementara indikator yang terakhir ialah karena gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga gas, tarif dasar listrik, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Haryanto (2015) dalam penelitiannya tentang persepsi kepercayaan masyarakat terhadap para elit politik mengungkapkan penyebab dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik adalah: bohong 29,28%, korupsi 14,75%,

mementingkan diri sendiri 8,24%, tidak kompeten 6,07%, berkasus 5,64%, tidak bertanggung jawab 1,95%, menyalahgunakan kekuasaan 1,52%, malas 1,52%, kurang transparan 1,30%, dan tidak tegas 0,22%.

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat Pemilu diadakan 5 tahun sekali. Pada tahun 2019 kali ini pemilihan umum yang dilakukan merupakan pesta demokrasi terbesar, karna pada tanggal 17 April 2019 kemarin, masyarakat Indonesia harus memilih anggota DPD, DPRD, DPR RI, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun mendatang. Pemilu ke Pemilu selalu menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Harapan agar ada perbaikan kondisi umum bangsa dan daerah. Harapan-harapan rakyat menjadi suratan amanah bagi para calon legislatif dan partai politik, karena berkat partisipasinya mengikuti pemilu dan menggunakan hak suaranya partai politik dan calon legislatif tersebut dapat terpilih.

Harapan besar Masyarakat setiap Pemilu adalah memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang dapat membela dan mementingkan kepentingan masyarakat, terutama dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun, setiap anggota legislatif dan pemimpin tidak begitu saja dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, karena mereka juga memiliki mekanisme dan prosedur yakni, Partai Politik. Sehebat dan sebaik apapun ide, gagasan dan kualitas anggota legislatif jika partai politik pengusungnya memiliki pandangan yang berbeda, wajib hukumnya anggota legislatif untuk patuh ada partai politik.

Citra pemerintahan yang semakin buruk dengan adanya persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme, selain itu juga terjadi penurunan angka kesejahteraan masyarakat telah menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada elit politik yang secara aktif menjalankan roda pemerintahan. Tingkat kepercayaan yang menurun ini berlangsung di pusat maupun di daerah-daerah baik pada pemerintahan terdahulu maupun pemerintahan sekarang.

Mahasiswa sebagai *Agent Of Change*, memiliki peran yang cukup penting dalam kancah perpolitikan Indonesia. Peran mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan tidak hanya terbatas dalam bidang akademik atau profesionalitas keilmuan saja, namun mahasiswa juga berperan menjadi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan. Peran ini dimanifestasikan melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan baik ekstra kampus seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Generasi Muda Budha Indonesia (GEMA BUDHI), Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan sebagainya, ataupun ekstra kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan yang cukup jika disatukan dalam sebuah aliansi untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berpolitik.

Peneliti melakukan survei mengenai kepercayaan terhadap partai politik kepada 30 mahasiswa dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penyebaran Angket Studi Pendahuluan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya tahu peran dan fungsi partai politik	25	5
2	Partai politik berperan penting dalam demokrasi Indonesia.	21	9
3	Menurut saya partai politik banyak di dominasi oleh kepentingan pribadi.	20	10
4	Menurut saya urusan perpolitikan tidak mempengaruhi kehidupan saya.	21	9
5	Hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini mengenai perpolitikan, membuat saya semakin tidak tertarik dengan partai politik.	17	13
6	Saya tidak berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan presiden tahun ini karena saya kurang mengenal calon yang akan saya pilih.	28	2
7	Calon dari partai politik yang saya pilih sebagai pejabat pemerintahan menajalankan tugasnya dengan baik.	21	9

Berdasarkan Tabel diatas, lalu dipresetasekan diperoleh hasil : dengan presentase 84% mahasiswa mengetahui peran dan fungsi partai politik, 15,4% mahasiswa tidak mengetahui peran dan fungsi partai politik. Selanjutnya 69,2% merasa partai politik berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, sedangkan 30,8% lainnya merasa partai politik tidak berperan penting dalam pemerintahan Indonesia. Sebanyak 65,4% mahasiswa setuju partai politik banyak didominasi kepentingan pribadi, sedangkan 34,6% lainnya tidak merasa demikian. Mahasiswa dengan presentase 69,2% merasa politik mempengaruhi kehidupan pribadinya dan 30,8% merasa kehidupan pribadinya tidak terpengaruhi oleh perpolitikan. Mahasiswa dengan presentase 42,3% merasa tidak lagi bersimpati

kepada partai politik setelah drama panjang perpolitikan Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, namun 57,7% mahasiswa masih merasa simpati dengan partai politik. Mahasiswa dengan presentase 96,2% mengakui keikutsertaannya dalam pemilihan legislatif dan presiden karena mereka merasa sudah mengenal dan yakin dengan calon yang mereka pilih, sedangkan hanya ada 3,8% mahasiswa yang memilih tanpa mengenal calon yang mereka pilih. Masih pada aspek yang sama, sebanyak 69,2% mahasiswa yakin bahwa calon yang mereka pilih sebagai wakil rakyat dan pemimpin mampu mengemban amanah dengan baik, sedangkan 30,8% lainnya tidak yakin. Sebagian mahasiswa juga meyakini bahwa partai politik hanyalah alat pencitraan seseorang untuk mencapai sebuah kekuasaan.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 84% mahasiswa mengetahui peran dan fungsi partai sehingga 69% menyetujui bahwa partai politik memiliki peran penting bagi sebuah negara demokrasi.

Tingkat kepercayaan mahasiswa cukup tinggi jika dilihat dari 96% mahasiswa akan mencari tahu dan mengenal calon legislatif dan calon presiden yang akan mereka pilih. Sehingga 69% mahasiswa merasa yakin anggota legislatif dan presiden yang mereka pilih akan menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun hasil survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan mahasiswa di Universitas Negeri Semarang tergolong cukup rendah, hal ini dibuktikan dari data di atas, mahasiswa merasa partai politik hanya sebagai alat pencitraan saja, karena 65% mahasiswa setuju para anggota partai politik terutama anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai perwakilan rakyat sebagai

anggota legislatif atau presiden akan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Selain itu juga dapat dilihat sebanyak 69% mahasiswa merasa bahwa masalah politik di Indonesia tidak akan mempengaruhi kehidupannya, padahal salah satu peran partai politik adalah membantu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal lain juga dapat dilihat selama pesta demokrasi tahun ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia politik, 98% mahasiswa mengaku merasa tidak lagi bersimpati kepada partai politik pasca pesta pemilu tahun 2019.

Peran politik mahasiswa ditunjukkan dengan adanya pembicaraan, perdebatan, dan diskusi mengenai isu-isu politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, maka mahasiswa akan melakukan aksi, terjun langsung menyuarakan gagasan mereka, untuk bertemu langsung dengan pejabat terkait dan memberikan saran agar kebijakan tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Gerakan mahasiswa ini muncul dikarenakan mahasiswa merasa kurang percaya dengan sistem politik dan pemerintahan. Mereka merasa lembaga politik terkait tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat, biasanya aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk pembelaan kepada rakyat.

Aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan pilihan alternatif untuk memberikan tekanan kepada lembaga politik untuk segera menyelesaikan permasalahan rakyat. Predikat diberikan mahasiswa sebagai pelaku perubahan

menjadikan mahasiswa memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam perpolitikan dikarenakan mereka bagian dari lapisan angkatan muda, terutama karena tingkat pendidikan tinggi yang mereka miliki. Mereka merasa bertanggung jawab dan dituntut untuk melibatkan diri dalam memperbaiki nasib negara dan bangsanya.

Berdasar pada hal-hal yang sudah dijelaskan mengenai konsep kepercayaan tersebut, maka upaya untuk mengkaji lebih jauh tentang masih adakah kepercayaan masyarakat terhadap partai politik khususnya pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang menjadi kajian yang menarik untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran Kepercayaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap partai politik setelah Pemilihan Umum 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk melakukan deskripsi mengenai gambaran Kepercayaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap partai politik setelah Pemilihan Umum 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang penelitian yang serupa sebelumnya mengenai kepercayaan terhadap partai politik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap perkembangan psikologi dalam bidang politik terutama bahasan mengenai kepercayaan pada partai politik.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kepercayaan Pada Partai Politik**

##### **2.1.1 Pengertian Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995 dalam Nawawi 2010). Kepercayaan lebih dari itu adalah fondasi dari semua hubungan manusia dan interaksi institusional, dan kepercayaan memainkan peran setiap kali kebijakan baru diumumkan (Ocampo, 2006 dalam Nawawi 2010).

Secara ilmiah, percaya adalah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dihendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko (Giffin, 1967 dalam Sukendar 2017:58). Definisi percaya di atas menyebutkan tiga unsur percaya: (1) Ada situasi yang menimbulkan risiko. Bila orang menaruh kepercayaan kepada seseorang, ia akan menghadapi risiko itu dapat berupa kerugian yang dialami. Bila tidak ada risiko, percaya tidak diperlukan. (2) Orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain. (3) Orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. *Why Am I Afraid to Tell You Who I Am* adalah judul buku yang ditulis oleh John Powell untuk melukiskan orang-orang yang berusaha menyembunyikan perasaan dan pikirannya pada orang lain (Rakhmat, 2011:130 dalam Zulkarnain, 2016 ).

Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiopsikologis. Kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib, tetapi

hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi. Jadi, kepercayaan dapat bersifat rasional atau irrasional. Contohnya, seseorang percaya bahwa bumi itu bulat, bahwa rokok itu penyebab kanker, atau bahwa kemiskinan itu karena kemalasan.

Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Bila orang percaya bahwa cacar disebabkan oleh makhluk halus, sikapnya terhadap vaksinasi akan negatif, dan ia cenderung menolak pengobatan secara medis. Bila orang percaya bahwa anak mendatangkan rezeki, kampanye Keluarga Berencana (KB) tidak akan menghasilkan apapun sebelum orang itu memperoleh kepercayaan yang baru (Rakhmat, 2011:41 dalam Zulkarnain, 2016).

Kepercayaan merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, di mana kepercayaan merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya, misalnya ketika seseorang untuk mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang ia percaya. Untuk dapat percaya, seseorang akan mengharapkan adanya *sense of responsibility*, percaya bahwa mereka akan berperilaku pada cara-cara yang dapat dipercaya. Untuk dapat percaya, seseorang akan berharap bahwa orang yang ingin ia percaya akan mengerti harapannya dan mengetahui cara untuk mengatasi keterbatasannya, karena itu hal yang paling esensial dari percaya adalah keterbukaan.

Percaya merupakan suatu kemungkinan yang subjektif dari seorang individu, yang mengharapkan individu lain untuk menunjukkan suatu tindakan tertentu. Segala kemungkinan yang terjadi bergantung pada bagaimana perilaku yang ditunjukkan orang yang kita percayai tersebut kepada kita, bagaimana mereka dapat memenuhi perilaku yang kita harapkan (Zulkarnain, 2016:144).

Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. *Interpersonal trust* dibangun melalui adanya risiko dan penerimaan dan dapat hancur karena adanya risiko dan tidak adanya sikap penerimaan. Tanpa risiko maka *trust* tidak akan terbentuk, dan hubungan tidak dapat maju dan berjalan. Ketika seseorang mengambil risiko dengan terbuka (*disclosing*) dalam membicarakan pemikiran-pemikirannya, informasi, kesimpulan, perasaan, dan reaksi pada suatu situasi dan pasangan akan memberikan respon yang positif berupa penerimaan, *support*, kooperatif, dan membalas kita dengan menjadi terbuka (*disclosing*) dalam membicarakan pemikiran, ide, dan perasaan mereka, di situlah *trust* dapat terbentuk dan berkembang (Muttaqien, 2016:6-9).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan kepercayaan (*trust*), baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah syarat mutlak pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan saling membutuhkan satu sama lain, kepercayaan menumbuhkan tata pemerintahan yang baik, pun sebaliknya.

### 2.1.2 Aspek-Aspek Kepercayaan

Menurut Johnson & Johnson (2012) aspek *trust* meliputi *trusting* dan *trustworthy*. *Trusting* (mempercayai) terdiri dari dua komponen, yaitu: (1) Keterbukaan (*openness*) adalah membagi informasi, ide-ide, pemikiran, perasaan, dan reaksi terhadap isu-isu yang terjadi. (2) Berbagi (*sharing*) adalah menawarkan bantuan material dan sumber daya kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu mereka menuju penyelesaian tugas. *Trustworthy* (dapat dipercaya) terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Penerimaan (*acceptance*) adalah melakukan komunikasi dengan orang lain dan menghargai pendapat mereka tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. (2) Dukungan (*support*) adalah hubungan dengan orang lain yang diketahui kemampuannya dan percaya bahwa mereka memiliki kapabilitas yang dibutuhkan. (3) Niat untuk berkerja sama (*cooperative intention*) adalah harapan bahwa orang lain dapat diajak bekerja sama untuk mencapai pemenuhan tujuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek *trust* terdiri dari *trusting* (mempercayai) yang meliputi *openness* dan *sharing* serta *trustworthy* (dapat dipercaya) yang terdiri dari *acceptance*, *support* dan *cooperative intention*.

### 2.1.3 Komponen-Komponen Kepercayaan

Rempel, Holmes dan Zanna (dalam Jogian, Johnson dan Briggs, 1997) menyebutkan 3 komponen kepercayaan (*trust*), yaitu: (1) *Predictability* merupakan keyakinan individu bahwa perilaku pasangan dapat diprediksi dan konsisten dalam sejumlah interaksi yang dicapai seiring berjalannya waktu

melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilewati dalam hubungan. (2) *Dependability* merupakan keyakinan individu bahwa pasangan merupakan seseorang yang dapat diandalkan dan sebagai tempat untuk bergantung. Hal ini didasarkan pada pasangan yang lebih memilih untuk menanggapi kebutuhan individu dalam situasi yang sulit dan bergantung pada respon pasangan di masa lalu. (3) *Faith* merupakan keyakinan individu bahwa pasangan akan selalu menjaga komitmen dan kesetiaan meskipun situasi di masa mendatang tidak dapat diperkirakan. Keyakinan ini tidak didasarkan pada pengalaman masa lalu dalam hubungan, namun lebih cenderung pada kepercayaan dalam diri individu terhadap komitmen pasangan.

#### **2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan**

Individu mengembangkan harapan mengenai tingkat bagaimana seseorang dapat *trust* kepada orang lain, bergantung pada empat faktor di bawah ini (Lewicki, 2006): (1) Predisposisi Kepribadian (*Personality Predisposition*), penelitian menunjukkan bahwa individu berada di dalam kecenderungan mereka untuk percaya kepada orang lain (Rotter, Wrightsman & Gillespie dalam Lewicki, 2006). Semakin tinggi tingkat individu dalam kecenderungan untuk *trust*, semakin besar harapan untuk dipercaya oleh orang lain. (2) Orientasi Psikologis (*Psychological Orientation*), Deutsh (dalam Lewicki, 2006) menyatakan bahwa individu membangun dan mempertahankan hubungan berdasarkan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Sehingga, untuk menjaga orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai dengan jiwa

mereka. Jika individu tidak menjaga hubungannya dengan orang lain dengan emosi yang baik, maka emosi tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang akan mencelakakan hubungan yang telah dijalani. (3) Reputasi dan Stereotip (*Reputation and Stereotype*), meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang dipelajari dari teman ataupun dari apa yang telah didengar (Ferris, Blass, Douglas, Kolodinsky, & Treadway dalam Lewicki, 2006). Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat yang membawa individu untuk melihat elemen untuk *trust* dan *distrust* serta membawa pada pendekatan pada hubungan untuk saling percaya. (4) Pengalaman Aktual (*Actual Experience*), pada kebanyakan orang, individu mengambil bagian dari pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi, dan berkomunikasi. Beberapa dari bagian tersebut sangat kuat di dalam *trust*, dan sebagian mungkin kuat pada *distrust*. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen *trust* maupun *distrust* memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan (Becerra & Gupta dalam Lewicki, 2006). Ketika pola yang terbangun sudah stabil, individu cenderung untuk menggeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya *trust* atau *distrust*.

Berdasarkan pemaparan di atas maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *trust* terdiri dari predisposisi kepribadian, orientasi psikologis, reputasi dan stereotip, serta pengalaman aktual.

### **2.1.5 Pengertian Partai Politik**

Sebagai negara demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan. Terbentuknya partai politik berawal dari anggapan bahwa dengan membentuk organisasi, mereka dapat menciptakan wadah untuk menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Banyak pandangan untuk memahami apa itu partai politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Handoyo, dkk (2010) partai politik merupakan organisasi partai, yang memberikan jalan bagi anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat guna mengisi jabatan-jabatan partai, publik, maupun administratif, dapat berasal dari kalangan partai maupun dari luar partai yang berkomitmen terhadap partai atau setidaknya yang dapat menguntungkan masa depan partai.

### **2.1.6 Tujuan Partai Politik**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 10, menyebutkan bahwa tujuan partai politik meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah: (1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, maka salah satu tujuan Partai Politik adalah untuk mewujudkannya. (2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya, menjaga dan memelihara keutuhan Negara bukan lah tugas Partai Politik saja melainkan tugas setiap warga negara Indonesia, untuk menjaga dan memelihara bisa dilakukan dengan cara menjunjung tinggi kebhinekaan, santun, gotong royong, dan toleransi. (3) Mengembangkan kehidupan berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. Kehidupan berdasarkan pancasila yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemasyarakatan yang dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, dan yang terkahir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu contoh mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, memberikan layanan pendidikan yang layak, memberikan bantuan sosial.

Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah: (1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah. Sebagai contoh, memberikan sosialisasi yang memadai, dan menyediakan layanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan politik seperti pemilu. (2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka seharusnya sebuah partai politik memiliki visi dan misi yang dapat mensjahterakan rakyat dan tidak mengingkarinya. (3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif pada saat proses pemilihan umum berlangsung, tidak melakukan kecurangan pada saat kampanye, dan menghargai pendapat orang lain.

#### **2.1.7 Fungsi Partai Politik**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11, fungsi partai politik adalah sebagai sarana: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Politik adalah suatu elemen penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara dengan sistem demokrasi, oleh karenanya setiap warga negara harus sadar dan peduli mengenai perpolitikan terutama di Indonesia. (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan suatu tatanan pemerintahan tidak mungkin semua orang masuk dalam struktural pemerintahan, maka harus ada orang-orang yang

mewakili setiap bidang yang dibutuhkan dalam tatanan pemerintahan. Maka proses ini dilakukan dengan mengadakan pemilu atau pemilihan umum. Oleh karenanya setiap partai politik wajib tertib selama masa kampanye dan tidak menimbulkan perpecahan selama jalannya proses pemilu (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan negara. Seusainya masa pemilu maka akan terpilih siapa saja yang menjadi wakil rakyat indonesia untuk menjalankan tatanan pemerintahan mereka yang terpilih menjadi presiden, wakil presiden, menteri dan wakil rakyat diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat indonesia. (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia. Dengan adanya partai politik menjadi bentuk dan alat partisipasi masyarakat dalam perpolitikan negara, dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

#### **2.1.8 Kepercayaan Pada Partai Politik**

Kepercayaan politik berkaitan bagaimana individu menilai lembaga yang berkaitan dengan partai, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau partai politik. Ketika individu memiliki kepercayaan tinggi, maka individu bersedia menerima risiko atas pilihan yang dilakukan berdasarkan harapan positif terhadap proses politik. Individu yang memiliki harapan positif cenderung akan terlibat dalam segala kegiatan yang dihasilkan dari proses partai, seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), berinteraksi dengan pemimpin partai, dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Menurut Askvik, dkk (2011)

ketika individu telah memiliki kepercayaan dalam lembaga, maka individu akan mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

Menurut Wong, dkk (2011) ada 2 faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik. Pertama, faktor institusi yang berkaitan dengan ekonomi dan *performance* dari pemerintah dan lembaga politik. Kedua, faktor budaya yang meliputi faktor sosiologis dan psikologis. Menurut Christensen dan Lagrid (dalam Wong, dkk 2011) budaya politik dan sosiodemografi variabel seperti umur, pendidikan, dan pekerjaan berperan dalam membentuk kepercayaan politik. Kepercayaan politik juga berkaitan dengan pengalaman positif.

Kepercayaan politik dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Easton membuat perbedaan antara kepercayaan tersebar, yang ia definisikan sebagai kepercayaan untuk sistem atau rezim dan kepercayaan khusus untuk para pemimpin politik saat ini (Levi & Stoker 2000 dalam Loeber 2011:5). Perbedaan lain yang kadang-kadang dibuat adalah perbedaan antara kepercayaan pada rezim dan kepercayaan pada institusi politik tertentu (Norris 1999 dalam Loeber 2011:5). Seseorang tidak harus memiliki tingkat kepercayaan yang sama dalam setiap komponen kepercayaan politik ini karena mereka memiliki sikap yang berbeda. Kepercayaan pada pemimpin saat ini sangat tergantung pada sudut pandang politik pemilih dibandingkan dengan para pemimpin saat ini sementara kepercayaan pada rezim demokratis biasanya dilihat sebagai sikap yang lebih konstan (Newton 1999 dan Levi & Stoker 2000 dalam Loeber 2011:5). Oleh karena itu berguna untuk memeriksa apakah komponen kepercayaan politik yang berbeda memiliki hubungan yang sama atau berbeda dengan kepercayaan dalam

proses pemilihan. Namun, kepercayaan pada para pemimpin politik saat ini tidak sering diukur. Namun yang diukur adalah sinisme politik terhadap politisi (Meijerink e.a. 2007 dalam Loeber 2011:5).

Menurut Loeber (2011) terdapat tiga dimensi kepercayaan politik (*political trust*), di antaranya: *trust with politicians* (*trust* terhadap para politisi termasuk di dalamnya pejabat pemerintahan), *trust with institution* (*trust* terhadap institusi politik, termasuk di dalamnya DPR, DPRD), dan *trust with democracy* (*trust* terhadap sistem demokrasi).

## **2.2 Mahasiswa**

### **2.2.1 Pengertian Mahasiswa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa disebutkan memiliki kemampuan mendekati kapasitas maksimum dalam memperoleh dan mengolah pengetahuan, dan dalam masa ini pula menjadi waktu bagi penyelesaian secara sistematis dan pencapaian tingkat kreatifitas yang baru. Melalui kuliah, individu mengalami tantangan akademis dan sosial yang mengarahkannya pada pengembangan intelektualitas dan moral (Jayanti 2012 dalam Elma 2017:27).

## **2.3 Penelitian Terdahulu Mengenai Kepercayaan pada Partai Politik**

Penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Wahyudi, dkk (2013) tentang “Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi berperan dalam partisipasi politik mahasiswa. Penelitian ini mengambil sampel pemilih pemula tetapi dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Yuliono (2013) di Surabaya ”Tentang Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik“. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik relatif rendah. Hal ini dikarenakan semua partai politik yang pernah dan masih berkesempatan memimpin rakyatnya dalam pemerintahan negara gagal memberikan kepercayaan terhadap pemilihnya, yaitu rakyat.

Penelitian yang dilakukan Handri, dkk (2015) tentang “Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya keterpercayaan terhadap elit politik adalah Bohong 29,28%, Korupsi 1,75%, Mementingkan diri sendiri 8,2%, Tidak kompeten 6,07%, Berkasus 5,64%, Tidak bertanggung jawab 1,95%, Menyalahgunakan Kekuasaan 1,52%, Malas 1,52%, Kurang Transparan 1,30%, Tidak Tegas 0,22%, dan lain-lain 29,50%.

Penelitian yang dilakukan Dawud pada tahun 2014 “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam (Studi Kasus di

Kecamatan Kebumen Pada Pemilu 2014) ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berasaskan Islam rendah. Data masyarakat yang menyukai partai politik berbasis Islam adalah PBB 13%, dan PKS hanya 27% hal ini mungkin dikarenakan adanya pemberitaan mengenai partai politik yang negatif termasuk partai yang melambangkan bulan sabit.

Marien (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh hasil pemilihan politik pada kepercayaan politik dengan melihat analisis multilevel pada dua puluh tiga negara. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan politik tinggi ketika hasil dari pemilihan politik tersebut proporsional. Sebaliknya jika negara tersebut tidak proporsional dalam pemilihan politik maka kepercayaan politiknya semakin rendah.

## **2.4 Kerangka Berpikir**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan partai politik sebagai lembaga yang penting dalam pemerintahan, karena berfungsi dan bekerjanya pemerintahan yang demokratis bergantung pada keberadaan partai politik. Sebagai lembaga yang penting untuk pemerintahan partai politik memiliki fungsi yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11, fungsi partai politik adalah sebagai sarana: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menentukan

kebijakan negara. (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

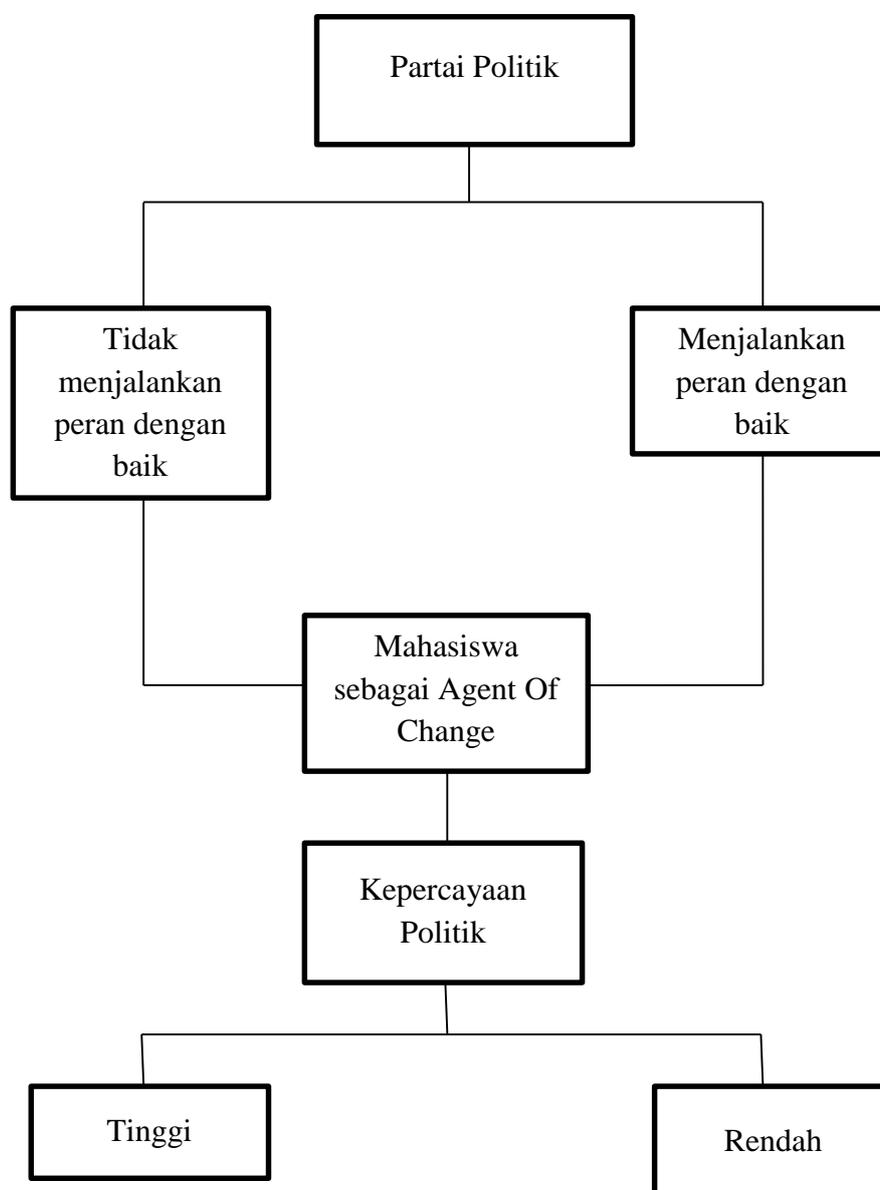
Partai politik sebagai sarana yang menampung aspirasi, masyarakat tentunya mengharapkan partai politik dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat dapat ditampung dan menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang nantinya dapat menyejahterakan rakyat. Partai politik yang menjalankan fungsinya dengan baik maka akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat sehingga masyarakat akan mendukung, menerima, dan terbuka terhadap partai politik tersebut. Selain itu masyarakat akan dengan senang hati membantu dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

Namun gejala menurunnya kepercayaan masyarakat pada partai politik sudah ada sejak lama. Golongan Putih (Golput) menjadi pilihan masyarakat pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal ini dipicu karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kader-kader politik, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu kinerja kader partai yang mengisi jabatan politik di pemerintahan mengalami penurunan. Kader-kader tersebut dirasa tidak dapat menemukan alternatif-alternatif dari aspirasi masyarakat, sehingga masih ada kebijakan-kebijakan publik yang tidak menyejahterakan masyarakat.

Mahasiswa sebagai *Agent Of Change*, mahasiswa memiliki peran yang cukup penting di kancah perpolitikan Indonesia. Peran politik mahasiswa ditunjukkan dengan adanya pembicaraan, perdebatan, dan diskusi mengenai isu-isu politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang

tidak berpihak pada rakyat, maka mahasiswa akan terjun langsung menyuarakan aksinya, untuk bertemu langsung dengan pejabat terkait dan memberikan saran agar kebijakan tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir**



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan politik Mahasiswa Unnes setelah Pemilihan Umum 2019 secara Umum dapat dikategorikan sedang cenderung rendah hal ini dapat dilihat berdasarkan *mean* empirik yang diperoleh adalah 70,33 dengan presentase sebesar 83,6 % dengan jumlah 175 orang subjek mahasiswa, maka sesuai dengan hasil hitung mean teoritik, tingkat kepercayaan politik Mahasiswa Unnes dikategorikan sedang cenderung rendah. Hal ini dapat mempengaruhi Partisipasi Mahasiswa pada saat pemilu, karena semakin rendahnya tingkat kepercayaan maka semakin rendah pula tingkat partisipasi seseorang.

Tingkat Kepercayaan Politik pada Mahasiswa Unnes dilihat berdasarkan 3 Aspek yaitu *Trust With Politicians*, *Trust With Institution*, *Trust With Democracy*. Jika dilihat dari ketiga aspek tersebut maka ketiganya berada ada kategori sedang cenderung rendah, namun Aspek yang paling tinggi pengaruhnya pada Kepercayaan Politik adalah aspek *Trust with Politicians*. Terdapat 2 indikator pada Aspek tersebut yaitu mengidolakan tokoh politik dan Mengidolakan tokoh partai, artinya seseorang ang menjabat sebagai pejabat pemerintahan sangat berpengaruh membuat seseorang percaya dengan partai politik.

Menurunnya tingkat kepercayaan Mahasiswa Unnes terhadap Partai Politik tentunya bukan tanpa sebab. Hal-hal yang menjadi faktor seseorang tidak lagi percaya pada partai politik adalah dikarena Mahasiswa merasa partai politik hanyalah alat pencitraan saja, dan banyak dari partai politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja tanpa mengedepnskan kepentingan rakyat. Selain itu mahasiswa merasa kebijakan-kebijkan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga mereka merasa enggan untuk menjalin komunikasi dan merasa bekerjasama dengan partai politik adalah kerugian besar. Dan Mahasiswa merasa perpolitikan tidak akan mempengaruhi kehidupannya.

Peneliti membagi Tingkat kepercayaan politik Mahasiswa Unnes menjadi dua kelomok yaitu, kelompok remaja lanjut dan kelomok Dewasa awal. Jika dilihat dari 2 kelompok usia yaitu Remaja Akhir dan Dewasa Awal dapat dikategorikan sedang cenderung rendah. Namun, skor *mean* empirik pada kelompok Dewasa Awal lebih tinggi dari pada kelompok Remaja Akhir. Hal ini mungkin dipengaruhi karena pada kelompok dewasa awal memiliki harapan lebih besar mengenai perubahan partai politik yang akan menjadi lebih baik.

Tingkat kepercayaan politik pada Mahasiswa jika dilihat dari 3 Fakultas yaitu FIP, FBS, dan FE tidak terdapat perbedaan tingkat yang signifikan, karena jika dilihat dari *mean* empirik ketiganya berada pada kategori sedang.

## **5.2 Saran**

Merujuk pada penelitian diatas peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Mahasiswa

Partai politik memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan negara Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga mahasiswa sebagai *agent of change* juga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik. Mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara baik dan damai. Sehingga harapannya dapat menciptakan suasana yang harmonis antara Mahasiswa, Masyarakat, dan para elit politik.

### 2. Bagi Elit Politik

Partai Politik sebagai salah satu elit politik seharusnya dapat menjalankan Fungsi dan perannya dengan baik. Sehingga aspirasi dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Untuk para anggota partai hendaknya tidak menjadikan partai politik sebagai alat pencitraan saja, dan jika sudah berada di kursi pemerintahan harusnya lebih mengedepankan rakyat sesuai dengan janji-janji yang dilakukan saat kampanye dan tidak mementingkan diri sendiri atau bahkan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dengan cara Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran Kepercayaan Politik dengan aspek atau dimensi variabel yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga akan mendukung berbagai teori baru yang bermunculan mengenai Kepercayaan Politik serta menambah jumlah subjek yang akan diteliti. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya melakukan *try*

*out* instrumen yang kemudian hasil perbaikan dari *try out* digunakan untuk skala penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Anti Korupsi* . (2017). Retrieved Maret 12, 2019, from Indonesia Corruption Watch : <https://antikorupsi.org/id/content/2017-jumlah-kasus-korupsi-menanjak>
- Akhrani, L. A. (2018). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Pemilih Pemula. 4.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Corral, M. (2002). (Mis)Trust in Political Parties in Latin America. 2.
- Creswell, W. J. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dawud. (2014). Tingkat kepercayaan masyarakat muslim pada partai brasaskan islam.
- Handri Chris Haryanto, T. R. (2015, Desember). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42.
- Karp., S. B. (2004). Politicians, Scandals, And Trust In. 26, 272 – 286.
- Kuncoro, M. W. (2018). Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula.
- Lewicki, R. (2006). Models of Interpersonal Trust Development: Theoretical Approaches, Empirical Evidence, and Future Directions. *ResearchGate*, 211-362.
- Loeber, L. (n.d.). Political trust and trust in the election process.
- Nawawi, J. (2010). Membangun Kepercayaan dalam wujud good governance. *Jurnal Psikologi* , 210-232.
- Nurfitri, A. D. (2018). Hubungan Antara Efikasi Politik dengan Partisipasi Politik Daring pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial di kota Semarang.
- Psikologi, Jurnal. (2012, Jurnal Psikologi). Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal Rechtsvinding* , 1.
- Purwanto, E. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: FIP Unnes.

- Rismawan, I. (2019, Februari 08). *Hukum*. Retrieved Mei 17, 2019, from Kntan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebanyak-454-kasus-korupsi-ditangani-sepanjang-tahun-2018>
- Sihombing, R. F. (2019, April Minggu). *Detail Berita*. Retrieved Mei Rabu, 2019, from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung: Alfabeta.
- Sukendar, M. U. (2017). *Psikologi Komunikasi : Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodeologi Penelitian* . Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Tashanda, N. (2016, Fbruari 24). *News*. Retrieved Maret 12, 2019, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/24/17044021/ICW.Sepanjang.Tahun.2015.Anggaran.Negara.134.Kali.Dikorupsi>.
- Wahyudi, H. (2013, Desember). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9.
- Wicaksono, P. E. (2015, Agustus 24). *Ekonomi*. Retrieved Juni 12, 2019, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2300477/ini-penyebab-kesejahteraan-masyarakat-indonesia-turun>
- Yuliono, A. (2013, Juni). Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik. *Administrasi Publik*, 11.
- Zulkarnain, I. (2016). *Kepercayaan dalam komunikasi politik: Tinjauan Psikologi Komunikasi*. Medan: Usuprees.